

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai proses penganggaran pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Proses penganggaran pada IPDN tahun 2016 dimulai :
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (Renja) IPDN
 - b. Proses penetapan pagu belanja kementerian/lembaga :
 - a) Pada bulan Januari-Maret , usulan belanja personal dari masing-masing unit kerja.
 - b) Pada awal bulan Maret, keluarnya surat edaran bersama kepala Bappenas dan Kementerian Keuangan tentang pagu indikatif dan rencana kerja pemerintah.
 - c) Disusunan Renja-K/L selanjutnya akan dibahas dalam pertemuan trilateral meeting.
 - d) Pada akhir bulan Juni, Kemenkeu dan Bappenas menyampaikan pagu anggaran.
 - e) Setiap kementerian selanjutnya menyusun RKA-K/L.
 - f) Pada awal Juli, RKA-K/L yang telah disusun dibahas di DPR.
 - g) Pada awal Agustus, RKA-K/L yang telah dibahas ditelaah oleh Kemenkeu (Direktorat Jendral Anggaran).

- h) Pertengahan bulan Agustus, Kemenkeu menyampaikan RAPBN dan himpunan RKA-K/L kepada DPR.
- i) Pada bulan Oktober, Kemenkeu menyampaikan alokasi anggaran.
- j) Pada awal November, dari pagu indikatif selanjutnya K/L menyusun RKA-K/L dan disampaikan kembali untuk di telaah oleh Kemenkeu berdasarkan alokasi anggaran.
- k) Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden tentang APBN
- l) Pada bulan Desember K/L menyiapkan konsep DIPA
- m) Konsep DIPA disahkan oleh pemerintah.

Dalam penyusunan perencanaan keuangan atau yang biasa di sebut dengan anggaran, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kampus Sumatera Barat sudah berpedoman kepada Undang –undang ,Peraturan Dalam Negeri dan teori penyusunan anggaran.

5.2 Saran

Untuk mencapai sebuah tujuan haruslah di ikuti dengan kerja keras dan berkemauan serta kesadaran yang tinggi dari aparatur, dan diharapkan agar aparatur dapat memahami betul arti tanggung jawab dari tugas – tugas yang telah di berikan dan di harapkan dapat melaporkan semua kegiatannya sehingga pelaksanaan penyusunan rancangan keuangan dapat terlaksana dengan semestinya sesuai peraturan yang berlaku.